

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan sosial maupun ekonomi di Indonesia, upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berkembang maupun berpartisipasi aktif dalam pengembangan perekonomian lokal pada wilayahnya. Tantangan kesenjangan gender di Indonesia masih terjadi dan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama di daerah yang memiliki indeks pembangunan relatif rendah. Data *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan bahwa indeks pemberdayaan perempuan Indonesia tergolong rendah dengan peringkat ketiga terendah di antara negara-negara ASEAN (UNDP, 2022). Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia masih belum merata dan terdapat hambatan signifikan yang perlu untuk diatasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menghadapi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan (BPS, 2021). Laporan Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY) tahun 2023 menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk ke dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin kedua terbesar di DIY, mencapai 122.54 ribu jiwa. Kondisi sosial ekonomi yang

menantang ini menempatkan perempuan di desa pada posisi yang rentan sekaligus memberikan perempuan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perempuan di desa seringkali menjadi tulang punggung keluarga, mengelola sumber daya yang terbatas dan menjalani berbagai peran produktif. Meskipun demikian, perempuan menghadapi permasalahan seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, sumber daya ekonomi, serta diskriminasi gender. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu upaya untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Gunung Kidul yang menjadi salah satu kabupaten dengan indeks pembangunan relatif rendah.

Pemerintah menginisiasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) untuk upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa. Program tersebut merupakan wujud dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Mandiri yang mengatur tentang implementasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dilaksanakan dengan berbagai jenis kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan, keterampilan, pendampingan usaha, dan akses terhadap modal usaha. Program Desa PRIMA bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan secara menyeluruh. Program ini memfokuskan pada upaya meningkatkan pendapatan perempuan melalui pengembangan usaha kelompok, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat hidup dengan layak,

berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) diimplementasikan di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul sejak tahun 2019. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan ekonomi produktif seperti kerajinan tangan dan pengolahan makanan lokal. Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) melakukan berbagai macam kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha perempuan. Perempuan di Kalurahan Putat diharapkan mampu meningkatkan keterampilan wirausaha serta menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Dunn (1987) memaparkan bahwa terdapat enam kriteria utama yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Relevansi, artinya evaluasi harus memberikan informasi bahwa baru dan penting bagi pelaku kebijaksanaan untuk beranjak lebih dari yang selama ini mereka anggap jelas dan terang.
- 2) Validitas, artinya evaluasi harus memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijaksanaan atau program.
- 3) Reliabilitas, artinya evaluasi harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsisten.

4) Obyektivitas, artinya evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak bias, yaitu informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama.

5) Ketepatan Waktu, artinya evaluasi harus membuat informasi tersedia pada waktu keputusan harus dibuat.

6) Daya guna, artinya, memastikan bahwa hasil evaluasi mudah dipahami dan bermanfaat bagi para pembuat keputusan dalam mengambil tindakan.

Keenam dimensi ini menjadi kerangka acuan yang komprehensif untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan (Aslinda & Ibrahim, 2018). Berdasarkan dari pembahasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran perempuan dalam pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program, serta mengukur sejauh mana program telah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas perempuan dan pengarusutamaan gender di tingkat lokal. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait merancang dan melaksanakan program pemberdayaan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana evaluasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pelaksanaan Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam pemberdayaan perempuan di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan perwujudan nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta. Selain sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan terkait

evaluasi pemberdayaan ekonomi dan diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Desa PRIMA Kalurahan Putat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan di Kalurahan Putat. Dengan mengidentifikasi praktik-praktik pemberdayaan yang baik dan mengetahui tantangan yang dihadapi, evaluasi ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki dan mengembangkan Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Selain itu, evaluasi ini akan memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa dan program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif.

3. Manfaat bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, evaluasi ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hasil evaluasi ini

diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika bab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian yang berfokus pada evaluasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Kalurahan Putat. Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Pembahasan mencakup tinjauan terhadap berbagai teori yang relevan dengan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks evaluasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA). Selain itu, bab ini menyajikan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis efektivitas program tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan desain penelitian yang komprehensif, mulai dari pemilihan pendekatan penelitian yang sesuai hingga teknik analisis data yang akan digunakan. Pembahasan meliputi pendekatan penelitian yang paling relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian yang valid dan reliabel.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan secara komprehensif terkait evaluasi program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kalurahan Putat. Melalui analisis data yang mendalam, bab ini akan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya memberdayakan perempuan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan umum berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta terdapat sejumlah rekomendasi yang relevan dengan temuan penelitian, baik untuk pengembangan kebijakan program maupun untuk penelitian selanjutnya.